

KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK HANCURKAN BUDAYA LUHUR BANGSA

M. Sidi Ritaudin*

Abstrak

Bangsa Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang mewarisi budaya luhur warisan nenek moyang, sehingga memiliki predikat sebagai bangsa yang beradab. Namun demikian, carut marutnya bangsa ini yang tidak lagi menyisakan keluhuran budi pekerti dan politik pun berjalan tanpa etika, yang terjadi adalah segala bentuk kecurangan, penipuan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta kehidupan individualistis, kapitalis dan konsumeristis, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin menganga, rakyat menderita, elit penguasa semakin berfoya-foya dan bermegah-megah.

Kata Kunci : Patologi Politik, Korupsi, elite politik,

Pendahuluan

Term “patologi”, dalam bahasa Inggris *pathology*, yang berarti ilmu tentang penyakit,¹ oleh karena itu istilah ini cukup *familiar* dalam dunia medis. Namun demikian, istilah ini muncul juga dalam ilmu sosial, yaitu patologi sosial, yang berarti ilmu tentang penyakit masyarakat. Analog dengan ini, maka patologi politik dapat disebut sebagai ilmu tentang penyakit politik dengan berbagai dimensinya, yang ingin disembuhkan dengan reformasi. Akan tetapi, semangat reformasi harus menyentuh posisi-posisi kunci, jika ingin berhasil.

Kata “kungkungan” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah situasi lingkaran setan yang membelenggu para elite pemimpin, elite politik, elite pemerintah, yang tidak berdaya di hadapan mafia korupsi, mafia kasus, mafia politik dan lain-lain berbagai penyimpangan dari komitmen bernegara dan berbangsa yang ditengarai sebagai penyakit

* Alumni Sekolah Pascasarjana UIN Syahida Jakarta adalah Dosen IAIN Raden Intan Lampung bidang ilmu Pemikiran Islam dengan homebasic di Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 736. Gilbert Vreeland, *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Yogyakarta : Absolut, 2006), h. 256.

M. Sidi Ritaudin: KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK...

politik (patologi politik). Penyakit politik ini ternyata berkembangnya cukup pesat dan beranak-pianak. Paling tidak di sana ada penyakit politik dagang sapi yang cukup dikenal dengan istilah *transactional politics* (politik transaksi/ janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan antarpolitikus atau konstituen dan lain-lain), hingga para pengusaha yang berdiri di belakang sebagai penyandang dana yang juga mempunyai tujuan terselubung.

Pada sisi lain, ada juga *abuse of power*, (penyalahgunaan kekuasaan), hal ini kerap kali terjadi, terlebih lagi jika kontrolnya lembek. Celaknya lagi, saat ini anggota DPR yang terhormat ditengarai meminta anggaran pada menteri untuk menyalurkan sendiri dana bantuan social kepada rakyat di DAPIL mereka masing-masing.² Kalau tidak ada kontrol dari rakyat dan Media Massa dan LSM, maka anggaran dapat kebobolan hingga triliunan rupiah. Posisi DPR sebagai wasit yang ingin ikut bermain ini merupakan penyakit kronis dalam politik, kecurangannya cukup jelas bahwa ia ingin memosisikan diri sebagai Sinterklas (tokoh suci di agama Kristen) yang konon sangat sayang dan selalu membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak pada hari-hari penting, terutama pada 6 Desember hari ulang tahun Sinterklas.

Penyakit politik yang lain adalah *conflict of interest*, yaitu pertentangan kepentingan. Pada awalnya, waktu masih sebagai rakyat biasa, berkoar-koar ingin membela rakyat. Ironisnya, setelah berkuasa “niat”nya pun berubah. Sifat aji mumpung berlaku, dan kemudian muncul keinginan untuk melanggengkan kekuasaan, ingin menimbun harta, ingin mengajak kroni-kroni dan keluarga dan lain sebagainya, sehingga timbullah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tubuh birokrasi pemerintahan.

²Bedah Editorial hari Kamis tanggal 26 Januari 2012, Abdul Qohar menegaskan bahwa ada dana 4 triliun dari Kementerian Pertanian yang mau diminta oleh DPR komisi 4 untuk dibagikan langsung oleh mereka, yaitu 50 % dari anggaran yang ada sebesar 8 triliun.

M. Sidi Ritaudin: **KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK**

Patologi politik ternyata memiliki kohesivitas yang cukup signifikan dengan persoalan ekonomi, birokrasi, sosial-kultural dan sistem politik. Orang bijak bilang, jika manusia semua berhati malaikat maka hukum sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, kejahatan politik alias politik yang tergerus oleh bisikan-bisikan setan tentu tidak lepas dari situasi “adanya kesempatan”, yaitu isitem birokrasi, sistem hukum yang tidak jelas. Misalkan saja, ketua umum sebuah partai politik, yang sudah kasat mata melakukan tindak pidana korupsi tidak tersentuh oleh hukum, karena supremasi hukum hanya kamuflase belaka, senyatanya politik yang berkuasa.³

Masih banyak rakyat Indonesia yang berpegang pada kekuatan budi luhur, sehingga sangat prihatin menyaksikan negeri yang diperjuangkan dengan tetes darah dan nyawa para pahlawan diinjak-injak oleh nafsu “mentang-mentang berkuasa”. Sebut saja misalnya filsafat *Aja Dumeh* (jangan mentang-mentang “senjata”/kekuasaan/kesewenangan), atau ajaran *Ngono ya ngono ning aja ngono*.⁴ Filsafat ini masih menjadi pandangan hidup rakyat Indonesia sebagai warisan dari leluhur nenek moyang bangsa Indonesia.

Bentuk dan Gejala Patologi

Kesalahan mendasar bagi para politisi dalam kiprahnya adalah menempatkan politik sebagai tujuan, kemudian demi mencapai tujuan menghalalkan segala cara. Lebih dari itu, mengartikulasikan politik sebagai kekuasaan dan kekuasaan berarti uang, maka politik menjadi jalan hidup yang harus dilewati. Oleh karena itu dapat diidentifikasi, paling tidak, ada tiga bentuk patologi politik yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini menjadi tema besar sasaran reformasi, antara lain adalah:

³Fenomena ini sudah menjadi rahasia umum, seperti kasus Wisma Atlet di Palembang, kasus Pusat Olah Raga di Ambalang Jawa Barat yang melibatkan Anas Urbaningrum Ketum Partai Demokrat. Kasus Muhaimin Iskandar Ketum PKB, dan masih banyak kasus-kasus yang lain yang semuanya menguap, senyap kemudian menghilang.

⁴Damardjati Supadjar, *Mawas Diri*, (Yogyakarta : Philoshophy Press, 2001), h. 46.

1. *Transactional Politics*

Romo Benny Susetyo menengarai bahwa tumbuh dan berkembangnya politik transaksional disebabkan karena tersumbatnya komunikasi politik para pemimpin, kepentingan rakyat tidak diakomodir, para pemimpin asyik maksyuk dengan jabatan mereka masing-masing, sehingga menimbulkan pola pikir individualistis. Sementara itu, TB Hasanuddin mengatakan bahwa orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi politis. Dalam pemilu (pilpres, pilkada, pileg, dan lain-lain hingga pemilihan Kepala Desa dan pemilihan RT) pun cenderung bermain politik uang (*money politic*). Tidak lagi berlaku memilih pemimpin berdasarkan kriteria-kriteria akademik⁵, tetapi kriteria politik, yaitu : "Saya pilih Anda, saya mendapatkan apa dari Anda?"⁶.

Gejala politik transaksional ini sudah muncul dan berkembang di setiap daerah. Ada yang berdalih bahwa biaya-biaya pemilu yang dikeluarkan secara pribadi, bukan *money politic*, melainkan *cost politic*. Hal ini terjadi karena *trust* terhadap pemimpin sudah tidak ada lagi, alasan para konstituen; "siapa pun yang menjadi pemimpin, kami tetap begini-begini saja", oleh karena itu, sekarang yang penting adalah siapa memberikan apa pada saya itu yang saya pilih. Agaknya semakin jelas bahwa situasi di Republik ini berada di bawah pengaruh kapitalisme.

2. *Abuse Of Power*

Penyalahgunaan kekuasaan sering sekali muncul ke permukaan pada para pemimpin yang arogan, sombong dan mentang-mentang. Hal ini berawal dari perasaan super yang mengiringi kekuasaan yang

⁵Calon pemimpin berdasarkan kriteria akademik, misalnya seperti dikemukakan oleh al-Mawardi; yaitu adil, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, panca inderanya lengkap dan sehat jasmani rohani, utuh organ tubuhnya, memiliki visi yang baik sehingga dapat membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka, memiliki keberanian dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Lihat dan bandingkan dengan Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), Terjemahan dari *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993), h. 63.

⁶Dialog Pagi Metro TV dengan TB. Hasanuddin dengan Romo Benny Susetyo, Jum'at 27 Januari 2012 Pukul 06.30.

dijabatnya. Padahal, sebelum menjabat suatu jabatan tertentu, dirinya adalah manusia biasa, rakyat biasa, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dia berwibawa karena jabatannya, dan jabatan (kekuasaan) itu adalah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang pejabat.

Akhir-akhir ini muncul di publik perbincangan hangat tentang “Negara Autopilot”, di mana-mana rakyat dilanda musibah, konflik, kelaparan, bencana alam dan lain sebagainya, tetapi “Negara” absen, tidak memberikan solusi. Sebut saja misalnya kasus Mesuji, kasus Bima, dan lain-lain, rakyat dari pelosok desa datang mendirikan kemah-kemah di depan gedung DPR, di depan Kementerian dalam Negeri, demo di depan Istana Presiden. Mereka tidak mendapatkan ayoman dan solusi, Negara benar-benar absen membiarkan rakyatnya terlantar begitu saja. *Abuse of Power*-nya adalah sikap mentang-mentang, you mau nangis air mata darah, mau jahit mulut silakan ! jawaban yang benar-benar menyakiti hati rakyat. Hancur luluh lantaklah budaya luhur bangsa yang santun, saling hormat menghormati, pemimpin adil rakyat patuh, semua sirna karena *abuse of power* para pemimpin bangsa.

3. Conflict Of Interest

Penyakit politik yang tidak kalah kronisnya adalah konflik kepentingan, sehingga di dalam tubuh satu partai pun terjadi “tarik-ulur” dalam mengambil sebuah keputusan. Kepentingan individu dan kelompok lebih mewarnai keputusan-keputusan politik daripada kepentingan publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa antara mulut dan hati bertolak belakang, tidak ada keterpaduan antara ucapan dengan tindakan, ini menjadi problem para pemimpin sekarang ini.⁷

Munculnya Patologi Politik di Indonesia

Para pemerhati politik pada umumnya berpendapat bahwa munculnya patologi politik sebagai gejala nasional disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah atau pemerintahan yang lembek⁸ Sehingga

⁷Sering kali disampaikan oleh Ahamad Syafi’I Ma’arif dalam forum-forum terbuka, terutama pada forum para pemimpin lintas agama dalam mengkritik pemerintah.

⁸Islam memberi respon bahwa kepemimpinan yang lembek itu disebabkan tidak profesional dan tidak proporsional, baik yang memilih/menempatkan maupun

M. Sidi Ritaudin: KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK...

nampaklah sebuah kenyataan *Dumeh*, dumeh kuasa, mentang-mentang berkuasa, dumeh wenang, sewenang-wenang. Kenyataan demikian itu agaknya sudah menggejala secara global sehingga tidak salah kalau orang membingkainya dengan pola kearifan yakni *Zaman Edan*, zaman gila. Karena itu, siapa yang tidak *ngedan* lalu tidak kebagian.⁹ Maka saat ini patologi politik telah menggurita ke semua sendi kehidupan politik, tidak saja eksekutif, melainkan juga legislative dan yudikatif, dari ibu kota Negara hingga pelosok-pelosok desa, rame-rame gila-gilaan tidak mengindahkan hukum dan aturan, “halal haram hantam”.

Kegalauan seorang Prof. Dr. T. Jacob telah diukirkannya dalam sebuah catatan di senjakala, yang tidak kurang dari 100 judul, kemudian dirangkumnya menjadi sebuah buku yang berjudul *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis*. Buku tersebut benar-benar menguak betapa kronisnya bangsa ini (baca Negara dan bangsa Indonesia), sistem politik Indonesia yang keliru, sehingga umatnya memegang persatuan dan kesatuan untuk berkorupsiria beramai-ramai di negara yang dimerdekakan melalui tetesan keringat dan darah bahkan nyawa para pejuang, sementara generasi penerus hanya berfoya-foya, hidup hidonis tanpa memikirkan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana cita-cita yang telah digariskan.

Menurut T, Jacob kemunculan kejahatan politik adalah adanya agresi terhadap adab, negerinya bringas, kejam. Pedang hokum, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hang Bejat di mana-mana, yang memiliki supremaasi atas Negara adalah oknum, bukan hukum. Sindrom kekuasaan menyelimuti elite penguasa. Bahkan T. Jacob berteriak keras: Wahai pemimpin, bersungguh-sungguhlah sedikit !,

yang dipilih/ditempatkan dalam suatu jabatan, yang semestinya seperti kata pepatah “*The right man on the right place*, tidak malah “*right or wrong is my country*”. Lihat, M. Sidi Ritaudin, “Karakteristik Ulil Amri dalam Format Étika Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” dalam Jurnal *Tapis*, Vo. 1/ No. 1 Januari-Juni 2005, h. 24.

⁹Damardjati Supadjar, *Mawas Diri*, (Yogyakarta: Philoshophy Press, 2001), h. 46-47.

M. Sidi Ritaudin: **KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK**

kemudian : Wahai pemimpin wariskan kecerdasan !¹⁰ Agaknya para elite pemimpin dewasa ini sudah tidak sungguh-sungguh mengurus negeri ini. Dalam konteks ini, benar kata mendiang Nurcholis Madjid bahwa negeri ini miskin dan kacau balau karena salah urus, Tuhan telah menganugerahkan segala kebaikan bagi Negara Indonesia, tetapi para elite penguasa tidak cerdas, kufur nikmat.

Kemiskinan yang menghimpit manusia dapat saja membawa pada kekufuran atas nikmat-nikmat Allah yang lain. Ekonomi politik kerap kali dijadikan senjata bagi yang kuat memangsa yang lemah dalam berpolitik. Umpamanya dalam berkompetisi, para kompetitor dalam pemilu sering melakukan *money politics*, politik beli suara dengan berbagai dalih dan cara, ada serangan fajar, ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi mukenah, payung, kaos dan lain sebagainya.

Masyarakat yang terbelakang baik dari aspek ekonomi, pendidikan dan pengetahuan agama, sudah pasti menjadi “makanan empuk” bagi orang-orang yang pintar dan berkuasa. Masyarakat miskin dan tidak memiliki pekerjaan tetap, bodoh dan tidak mengerti agama, posisi mereka senantiasa akan tertindas. Masyarakat Indonesia sudah mendarah daging dengan budaya fiodalismsenya, sehingga sangat kagum dan menghormati orang-orang kaya. Oleh karena itu maka munculnya Orang Kaya Baru (OKB) setelah ia mendapat jabatan dengan menempuh berbagai cara, berhutang, mengambil kredit barang-barang berharga, hingga melakukan perbuatan tercela korupsi. Karena berubah pola hidup dari sederhana ke konsumerisme dan hidonisme.

Fenomena debat kusir patologi politik versus patologi politik memunculkan pertanyaan siapa yang salah duluan, mana duluan telur atau ayam. Hal ini terjadi karena elite penguasa “tidak becus” mengurus Negara, sehingga terjadi kemelut penyimpangan demi penyimpangan. Ketika para pejabat salah dalam menuangkan kebijakan dalam aturan, maka rakyat bereaksi keras, seperti

¹⁰Baca T. Jacob, *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis Catatan Di Senjakala*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 9-17, 45258-262).

M. Sidi Ritaudin: KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK...

munculnya demo buruh di Bekasi dan Bandung akhir-akhir ini, di mana lebih dari 4000 perusahaan dengan 15.000 lebih karyawannya berdemo untuk menuntut kenaikan upah minimum, sehingga memblokir jalan tol, menimbulkan kemacetan lebih dari dua jam lamanya. Tindakan ini oleh sementara pihak dianggap melawan hukum, padahal membela hak juga tuntutan hukum, bukankah aksi-aksi sosial merupakan refleksi dari kualitas ketaatan seorang hamba kepada Allah.¹¹

Dampak patologi politik bagi kehidupan Negara, masyarakat dan individu

Sebagai sebuah kejahatan sudah barang tentu dampak patologi politik sangat buruk bagi kehidupan Negara, masyarakat dan individu. *Public Trust* atau tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat rendah, bahkan indikatornya dapat diukur dari partisi publik dalam pemilu, Golput menjadi pemenangnya. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah jenuh dan tidak memiliki kepercayaan sama sekali terhadap pemerintahan yang korup, komunikasi politik sudah tersumbat rapat, sehingga menyebabkan mereka (rakyat) prustasi.

Indikator lain dari dampak patologi, rakyat kelas bawah semakin kesulitan dalam bidang ekonomi, untuk makan saja sudah tidak berdaya, pengangguran semakin membengkak. Harga-harga bahan pokok semakin melambung dan sulit dijangkau oleh rakyat kecil. Pajak semakin meninggi tetapi tidak memperbaiki infrastruktur, bahkan jalan-jalan semakin rusak, air bersih, lingkungan hidup, pendidikan, bencana alam dan berbagai persoalan lainnya tidak pernah teratasi, ironinya tidak ada seorang pejabat pun yang mau mengaku bertanggung jawab, bahkan saling melempar persoalan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya, sementara *top leader*-nya hanya

¹¹Lihat Muhammad Kamal Hasan "Perkara Nurcholis Madjid" dalam Jalaluddin Rakhmat, et al., *Tharikat Nurcholishy, Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 100.

membungkam seribu bahasa dan tidak ada tindakan konkrit dalam mengatasinya, sehingga Negara semakin terpuruk.

Peran politik dalam penanggulangan kejahatan politik, terutama korupsi

Dinamika politik dan perilaku elite yang berkembang di kalangan pemimpin, (baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif) belakangan ini merupakan fenomena baru dan sekaligus sebagai wujud adanya kebebasan berekspresi dan berkumpul untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan Negara. Sampai di sini, agaknya masih terlihat positif. Namun pada tataran implementasi, muncul perspektif “*minna wa minhum*”, adanya kelompok-kelompok tertentu yang mendominasi, bahkan mengkooptasi kelompok lain terutama kelompok minoritas, sehingga menjadi alat *bargaining power* dalam mengambil sebuah putusan di parlemen.¹² Karena tekanan kekuasaan yang cukup kuat, maka para wakil rakyat mencari solusinya sendiri-sendiri, yaitu berupaya menggerogoti APBN melalui berbagai cara, umpamanya melalui Banggar dan BURT meminta-minta proyek,¹³ melakukan renovasi-renovasi, mulai dari ruangan, gedung hingga WC, yang nominalnya cukup pantastis, tidak masuk akal, seperti WC satu unit mencapai 2 Milyar, kursi satu unit bernilai 40 juta.

Guna menyelesaikan persoalan penyakit politik yang sudah sangat kronis, yang sudah menggurita ke semua sektor kehidupan politik, maka penyelesaiannya adalah dengan keputusan politik, tidak di DPR, tetapi pemimpin tertinggi di negeri ini, yaitu presiden. Persoalan mendasar adalah bagaimana kalau presidennya tidak berani,

¹²Partai pemenang pemilu presiden yang mencapai 60 % lebih, ternyata tidak cukup *confident*, sehingga masih perlu membentuk koalisi di kabinet, sebut saja misalnya Partai Demokrat merangkul Partai Golkar, PPP, PKB, PAN dan PKS, mungkin saja maksudnya agar dapat memuluskan hajat pemerintah di parlemen, *wallahu a'lam bish-shawab*.

¹³Karni Ilyas mempersoalkan, jika eksekutif dan legislative sama-sama melakukan korupsi, lalu bagaimana solusi penanggulangannya. Menurut Romo Benny Susetyu, harus ada perbaikan sistem yang revolusioner. Dikemukakan oleh Karni Ilyas dan Benny Susetyo di Media Metro TV.

M. Sidi Ritaudin: KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK...

presidennya lembek dan penakut, takut menanggung risiko, mungkin risiko dibenci rakyat, risiko dibunuh dan lain sebagainya, yang jelas jika terus menerus didiamkan dan selalu dibiarkan, maka risiko di akhirat jelas mendapat laknat dan kutukan.

Keselamatan dan kesejahteraan rakyat sangat bergantung kepada siapa yang menjadi pemimpin. Begitu pentingnya peran seorang pemimpin, agaknya tidak ada salahnya jika dihayati wasiat seorang pemimpin besar Islam yang pernah berjaya mengatasi persoalan patologi politik, yang memerintah dalam jangka waktu dua tahun lima bulan. Di masa pemerintahannya dia telah memenuhi dunia dengan keadilan, mengembalikan semua harta yang diambil dengan cara yang tidak halal dan kejam. Dia telah melakukan banyak tradisi yang baik.

Adapun wasiat berharga tersebut adalah: “Banyaklah mengingat mati agar dapat bersikap bijaksana, jangan berdusta karena dapat mendatangkan bencana. Hendaknya selalu bertaqwa kepada Allah. Perhatikan rakyatmu, perhatikan rakyatmu karena sesungguhnya engkau tidak akan lama di dunia, semua pasti akan mati”.¹⁴ Jika para politisi, elite penguasa, para pemimpin negeri ini betul-betul merespon dan menjadikan wasiat Umar bin Abdul Aziz ini sebagai dasar etika politik mereka, maka dipastikan, Negara adil makmur, rakyat sentosa dan sejahtera akan terwujud.

Rupa-rupa patologi politik dari perspektif ajaran Islam

Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw., tampil pertama kali di atas panggung politik, di bawah naungan iman dan

¹⁴Kutipan ini tidak persis seperti aslinya melainkan saduran, lihat Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, terj. Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 273, 275, 292.

M. Sidi Ritaudin: **KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK**

taqwa, ini tidak ahistoris, ini fakta dan realita.¹⁵ Ajaran utamanya adalah memperbaiki etika global dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya tentunya adalah bidang politik. Oleh karena itu Islam akan tampil dengan fungsi profetiknya, dan akan membebaskan umat dari intrik-intrik patologi politik, hanya jika umatnya memenuhi panggilan wajibnya untuk merealisasikan ajaran moral kanjeng Nabi tersebut.¹⁶ Jika prinsip dasar ini dihayati, maka sikap hidup politik akan “slow” tidak terlalu menggebu-gebu dan melakukan segala cara. Jauh-jauh akan menghindari gaya “mencari barisan”, “membentuk kekuatan” (yang cuma berorientasi politis), sebab yang harus dikedepankan adalah moral dan etika politik sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Ajaran Islam mengajarkan politik yang santun, mengedepankan etik¹⁷ tidak boleh ambisi, pemimpin yang adil, amanah, bijaksana, berani dan cerdas. Berseberangan dengan konsep ini berarti sebuah penyimpangan, sebuah pelanggaran, sebuah penyakit. Karena diyakini seyakin-yakinnya oleh umat bahwa Islam adalah sistem yang komprehensif melampaui IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan). Maka berbagai macam rupa patologi politik sangat berkaitan dengan tindakan politik berupa penyimpangan terhadap nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri.

¹⁵Setelah pondasi iman dan taqwa terbangun dengan kokoh, kemudian rasulullah Saw berhijrah ke Madinah dengan para pengikutnya, maka ia berkedudukan sebagai Rasul dan sekaligus kepala Negara. Lihat, Marshal G. S. Hodgson, *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik Islam, Buku Pertama lahirnya Sebuah Tatanan Baru*, terj. Mulyadhi Kartanegara, (Jakarta : Paramadina, 1999), h. 267-268.

¹⁶Mohammad Sobary, “Merombak Primordialisme Dalam Agama”, dalam Elga Sarapung, dkk (Tim Editor), *Spiritualitas Baru Agama & Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta : Institut DIAN/ Interfidei, 2004), h. 52

¹⁷Ingat ajaran Nabi yang paling krusial adalah bahwa Rasulullah saw itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, termasuk (baca terutama) dalam persoalan politik. Bagaimana beliau membangun konstitusi madinah, dan tidak membangun feodalisme dan system monarki dalam politik.

M. Sidi Ritaudin: KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK...

Secara konstitusional (konstitusi Negara Islam pertama/ Piagam Madinah) cukup jelas aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi umat Islam, yang memiliki kekuatan syar'i yang harus dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam mengatur Negara, sebab konstitusi tersebut dibuat dan disahkan oleh Nabi Muhammad Saw., sendiri, sehingga posisi hukumnya berada pada tingkat Hadits yang mutawatir. Oleh karena itu, keluar dari rel konstitusi berarti penyimpangan dan itu tergolong patologi politik.

Konstitusi Madinah yang dibuat oleh Rasulullah tersebut sejalan dan relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang dibangun di atas prinsip-prinsip pluralisme, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan permufakatan.¹⁸ Di sisi lain penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan mematuhi ajaran-ajarannya. Oleh karena ajaran Islam bersifat universal, terutama sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka jika diakses bagaimana sistem dan penyelenggaraan kehidupan politik Negara Madinah niscaya dapat mewujudkan situasi politik yang kondusif membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ditakuti oleh Negara-negara yang memusuhi (termasuk Negara yang berseberangan ideologi politik) dan disegani oleh Negara-negara sahabat.

Analisis solutif untuk mengeliminir patologi politik

Patologi politik seperti KKN memang menjadi naluri manusia, sudah menjadi sifat dasar manusia tamak dan loba dan memanfaatkan kesempatan "aji mumpung", juga kecenderungan untuk bersikap nepotism merupakan naluri dasar manusia. Oleh karena itu manusia memerlukan tuntunan agama, undang-undang dan aturan-aturan yang

¹⁸Baca Piagam Madinah, pasal 25 umpamanya yang mengakomodir pluralisme dan kebebasan beragama. Lihat, Zaenal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah*, (Jakarta : Al-Faraby, Kinta, 1968), h. 26. Bandingkan dengan dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila.

M. Sidi Ritaudin: **KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK**

bersifat universal. Maka solusi utamanya adalah melakukan pendidikan politik, bagaimana politik yang beretika, politik yang santun dan bermartabat. Jadi bahan dasarnya yang harus dibidik, yaitu sumber politik itu sendiri.

Lebih jauh dari itu, pembangunan demokrasi yang digalakkan dan sudah menjadi kontrak politik di negeri ini harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, tidak saja diartikan sebagai sistem bebas menyatakan pendapat, melainkan diartikan juga sebagai doktrin pemerintahan, di mana tidak ada “pengendapan” kekuasaan mutlak di suatu tempat tertentu, harus diartikan sebagai suatu *continuos chain of control* hingga dapat dihindari atau dibatasi sekecil mungkin adanya *mis-used of authority*, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang¹⁹ yang dapat mengakibatkan hancurnya suatu Negara. Oleh karena itu, tidak dapat ditawar-tawar lagi, bahwa partisipasi public harus ditingkatkan sebagai control social terhadap pemerintahan, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah, dalam hal ini penegakan hukum sebagai konsekuensi dari “Negara Hukum”. Jadi benar respon publik bahwa awal dari segala macam kehancuran disebabkan oleh tidak jalannya aturan-aturan dan hancurnya sistem hukum.

Kekacauan politik, terutama pasca-reformasi, disebabkan oleh alpanya kepastian hukum berikut penegakannya yang ditengarai para pencuri, para rampok dan para perompak (koruptor-koruptor) semakin hari semakin merajalela sehingga menyusup ke semua lapisan dan lini kehidupan. Lembeknya keteladanan elite kepemimpinan nasional, gaya hidup kapitalis dan hidonistis merupakan penyebab utamanya. Agar dapat keluar dari kondisi tersebut, nampaknya perlu sosok pemimpin yang padu antara ucapan dan tindakan. Di depan publik bersumpah akan mengunus pedang dan siap berjihad melawan

¹⁹Lihat H.M. Subchan ZE. “Politik Sebagai Sarana dalam Pembangunan Ekonomi” dikutip oleh Ridwan Saidi “Dinamika Kepemimpinan Islam dalam Era Orde Baru” dalam M. Amin Rais (ed), *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h. 130.

M. Sidi Ritaudin: KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK...

korupsi, dalam tindakan omong kosong, isapan jempol belaka, tidak lebih hanya lolongan pencitraan diri.

Secara realistis, melihat kondisi saat ini yang semakin hari semakin mengesankan, Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang “bisa” memposisikan hukum sebagai panglima, penuh integritas, tegas dalam bertindak, terhindar dari intrik-intrik, memiliki komunikasi politik yang baik. Dan yang lebih penting ia mampu membawa penumpang kapal besar yang bernama Negara ini kepada kesejahteraan lahir batin, inilah inti tujuan bernegara.²⁰ Jika tidak maka “kapal besar” akan karam dan tenggelam, atau hancur berantakan diterpa badai korupsi, karena tidak hanya nakhoda atau sang kapten yang membelakangi komitmen bernegara, tetapi sudah merasuk ke para ABK-nya.

Kebejatan politik yang paling mendasar, dikatakan mendasar dapat menjadi penyebab kejahatan-kejahatan berikutnya, seperti korupsi, ketidakadilan memimpin, kecurangan dalam pemilu dan lain sebagainya, adalah “politik membangun kerajaan”. Fenomena elite penguasa, terutama di daerah-daerah mencitrakan diri sebagai orang berdarah biru, politik feodalisme menggejala bangkit kembali. Nepotisme dalam skala besar, yaitu pewarisan kekuasaan pada garis keturunan. Bapaknya Gubernur anaknya jadi Bupati, bapaknya Bupati anaknya ketua partai yang akan diorbitkan menjadi Bupati atau Gubernur di masa-masa mendatang. Tekanan politik seperti ini membuat “muak” rakyat kecil yang kondisinya tidak pernah membaik,

²⁰Formulasi kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan dan persatuan, keadilan dan permufakatan antarsesama warga, antara pemimpin dan rakyatnya, dalam islam disebut sebagai Negara “*Baldatum Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*”, sebagai tujuan Negara, diilustrasikan bahwa kebutuhan pokok rakyat terpenuhi bahkan melimpah ruah sebagai anugerah tuhan yang harus disyukuri. Kesuksesan pemimpin ini digambarkan pada Surat Saba/34 : 15, An-Nmal/27 : 22, pada pemerintahan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Lihat, Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning the Glorious Qur’an*, (Kairo : Dar al-Kitab al-Mishr, Beirut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1938), h. 1138.

M. Sidi Ritaudin: **KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK**

meski gonta-ganti pemimpin. Membuat masyarakat apatis dan pasrah terhadap nasib mereka.

Bertolak belakang 180 derajat dengan tauladan politik Rasulullah Saw yang tidak menunjuk pengganti yang memimpin Negara sepeninggal beliau, sebab katanya :”*Sesungguhnya jika aku menunjuk penggantikmu, aku khawatir kalian akan menentang penggantikmu itu dan Allah akan menurunkan azab atas kalian*”.²¹

Memperhatikan dan mencermati teks hadits di atas, agaknya munculnya fenomena bencana demi bencana pasca pelantikan seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai indikator dari kemurkaan Allah atas kecurangan politik dalam proses suksesi. Sebagai contoh, bencana alam silih berganti muncul di berbagai tempat, bencana krisis BBM tak kunjung usai, bencana korupsi merajalela, mafia kasus, mafia hukum, mafia jabatan dan lain sebagainya tidak kunjung tuntas, mengapa tidak introspeksi diri wahai elite politik, kegagalan mengatasi persoalan berarti tidak mendapat dukungan positif, baik secara horizontal, dari rakyat kecil di bumi dan secara vertikal dari Tuhan Yang Maha Esa di langit, sehingga Tuhan pun murka.

Rendahnya kesadaran politik publik suatu bangsa sangat jelas mengindikasikan minimnya pendidikan politik. Lebih ironis lagi jika sumber daya politik elite pemimpin yang minim edukasi. Kecelakaan yang paling vatal jika politik dijauhkan dari pendidikan. Pendidikan politik, dengan tujuan untuk membekali pengetahuan, orientasi, dan kemampuan yang memungkinkan manusia menjalani kegiatan politik di tengah masyarakat, merupakan masalah yang sangat krusial, karena politik adalah segala sesuatu yang sifatnya dapat merealisasikan kebaikan di tengah masyarakat, sehingga politik dapat dikategorikan sebagai bagian dari akhlak.²² Semua jenis patologi politik muncul di

²¹HR. al-Hakim dalam *al-Mustadrak*.

²²Lihat, Muhammad Ali Muhammad, Ali Abdul Mu'ti, *As-Siyasah baina An-Nazhariyah wa Tathbiq, /Politik, antara Teori dan Praktik*, (Iskandariyah : Dar al-Ma'rifah, 1984), h. 7.

M. Sidi Ritaudin: KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK...

suatu bangsa, karena rakyat dan pemimpinnya tidak memiliki kesadaran etik dalam berbangsa dan bernegara.

Upaya pemisahan antara politik dan pendidikan dan menafikan saling pengaruhnya merupakan pemaksaan yang menyebabkan bahaya bagi keduanya secara bersamaan. Keadaan ini sudah berlangsung lama, politik terlepas dari misinya dan kehilangan unsur edukatifnya yang khas. Pendidikan pun hanya menjadi urusan yang marjinal dan sekedar fungsi klise untuk memelihara nilai dan pemikiran yang ketinggalan zaman, tidak memiliki peran pembimbing ke arah masa depan dalam kehidupan masyarakat dan dinamika peradabannya. Hal ini cukup jelas terlihat bagaimana situasi dan kondisi perpolitikan nasional yang amoral dan pendidikan tidak menghasilkan politisi yang memiliki integritas yang tinggi.²³

Penutup

Fenomena kejahatan politik atau penyimpangan politik yang dilakukan oleh elite penguasa dari konstitusi dan perundang-undangan semakin nyata dan sangat menyakitkan terasa oleh publik. Di setiap peristiwa yang menyentuh hajat orang banyak (rakyat kecil) sering kali negara absen, tidak memberikan solusi, semuanya dibiarkan menggelinding begitu saja. Prinsipnya biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Hal ini tidak boleh terjadi dalam suatu Negara. Semua persoalan harus dituntaskan oleh Negara. Korupsi merajalela,

²³Sekedar menyebut contoh, bagaimana publik menyaksikan para wakil rakyat di parlemen adu jotos. Para koruptor tidak merasa bersalah dan berdosa berpose di depan publik. Di dunia pendidikan banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti plagiatisme karya ilmiah, jual beli nilai, korupsi pengadaan barang dan jasa dan lain-lain. Kericuhan di dunia pendidikan, selama berpuluh-puluh tahun, sejak prakemerdekaan RI, adanya dualisme pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, sehingga muncul dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Ini secara politis merugikan generasi bangsa, generasi masa depan, melek intelektual tapi buta politik. Melek politik tapi hati nuraninya mati.

M. Sidi Ritaudin: **KUNGGUNGAN PATOLOGI POLITIK**

pengangguran semakin hari semakin membengkak, bahan-bahan kebutuhan pokok semakin melambung, BBM sulit didapat, harganya pun tidak terkendali, kerusakan terjadi di setiap tempat, dan demo-demo setiap hari terjadi, dan bencana alam pun tidak kurang-kurang member peringatan, pokoknya kekacauan terjadi di mana-mana dengan berbagai persoalan, jika tidak segera diambil tindakan dan dituntaskan, maka Negara akan hancur.

Penyelamatan bangsa ini dari kehancuran, keterpurukan, ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan bahkan bukan tidak mungkin terjadi disintegrasi bangsa, harus diupayakan sekuat tenaga dan pikiran melepaskan diri bangsa dari kungkungan patologi politik. Kesewenag-wenangan elite penguasa, konflik kepentingan, politik ttransaksional dan abuse of power, merupakan intrik-inrik politik, inilah musuh nyata masyarakat dan Negara.

Sebagai upaya penyelesaian persoalan adalah dengan membangun pendidikan politik, rakyat harus diberikan pencerahan dan pencerdasan politik, sehingga politik yang dimainkan adalah politik tingkat tinggi (politik yang beretika), bukan politik rendahan seperti politik dagang sapi atau politik transaksional, politik *abuse of power* dan politik kepentingan yang biadab. Antara politik dan pendidikan merupakan dua entitas yang bersifat simbiosis mutualistik, yang harus dibangun dan ditegakkan. Hukum diposisikan sebagai panglima tertinggi dalam menegakkan keadilan. Prinsipnya harus dimulai dari top leader, memberikan keteladanan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, walaupun kedatangan Fatimah anak beliau yang mencuri niscaya ia sendiri yang akan memotongnya.

Daftar Pustaka

M. Sidi Ritaudin: KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK...

- Ahmad, Zaenal Abidin, *Piagam Madinah*, Jakarta : Al-Faraby, Kinta, 1968.
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Meaning the Glorious Qur'an*, Kairo : Dar al-Kitab al-Mishr, Beirut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1938.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Hasan, Muhammad Kamal “Perkara Nurcholis Madjid” dalam Jalaluddin Rakhmat, et al., *Tharikat Nurcholishy, Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Hodgson, Marshal G. S., *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunisa Masa Klasik Islam, Buku Pertama lahirnya Sebuah Tatanan Baru*, terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta : Paramadina, 1999.
- Jacob, T., *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis Catatan Di Senjakala*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mawardi, Imam al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, Terjemahan dari *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Muhammad, Ali Muhammad, Ali Abdul Mu'ti, *As-Siyasah baina An-Nazhariyah wa Tathbiq, /Politik, antara Teori dan Praktik, Iskandariyah : Dar al-Ma'rifah, 1984.*
- Ritaudin, M. Sidi, “Karakteristik Ulil Amri dalam Format Etika Politik Islam Perspektif Al-Qur'an” dalam Jurnal *Tapis*, Vo. 1/ No. 1 Januari-Juni 2005.
- Sobary, Mohammad, “Merombak Primordialisme Dalam Agama”, dalam Elga Sarapung, dkk (Tim Editor), *Spiritualitas Baru Agama & Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta : Institut DIAN/ Interfidei, 2004.
- Supadjar, Damardjati, *Mawas Diri*, Yogyakarta : Philoshophy Press, 2001.
- Suyuthi, Imam As-, *Tarikh Khulafa'*, terj. Samson Rahman, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Vreeland, Gilbert, *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, Yogyakarta : Absolut, 2006.

M. Sidi Ritaudin: **KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK**

ZE, H.M. Subchan,. “Politik Sebagai Sarana dalam Pembangunan Ekonomi” dikutip oleh Ridwan Saidi “Dinamika Kepemimpinan Islam dalam Era Orde Baru” dalam M. Amin Rais (ed), *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.